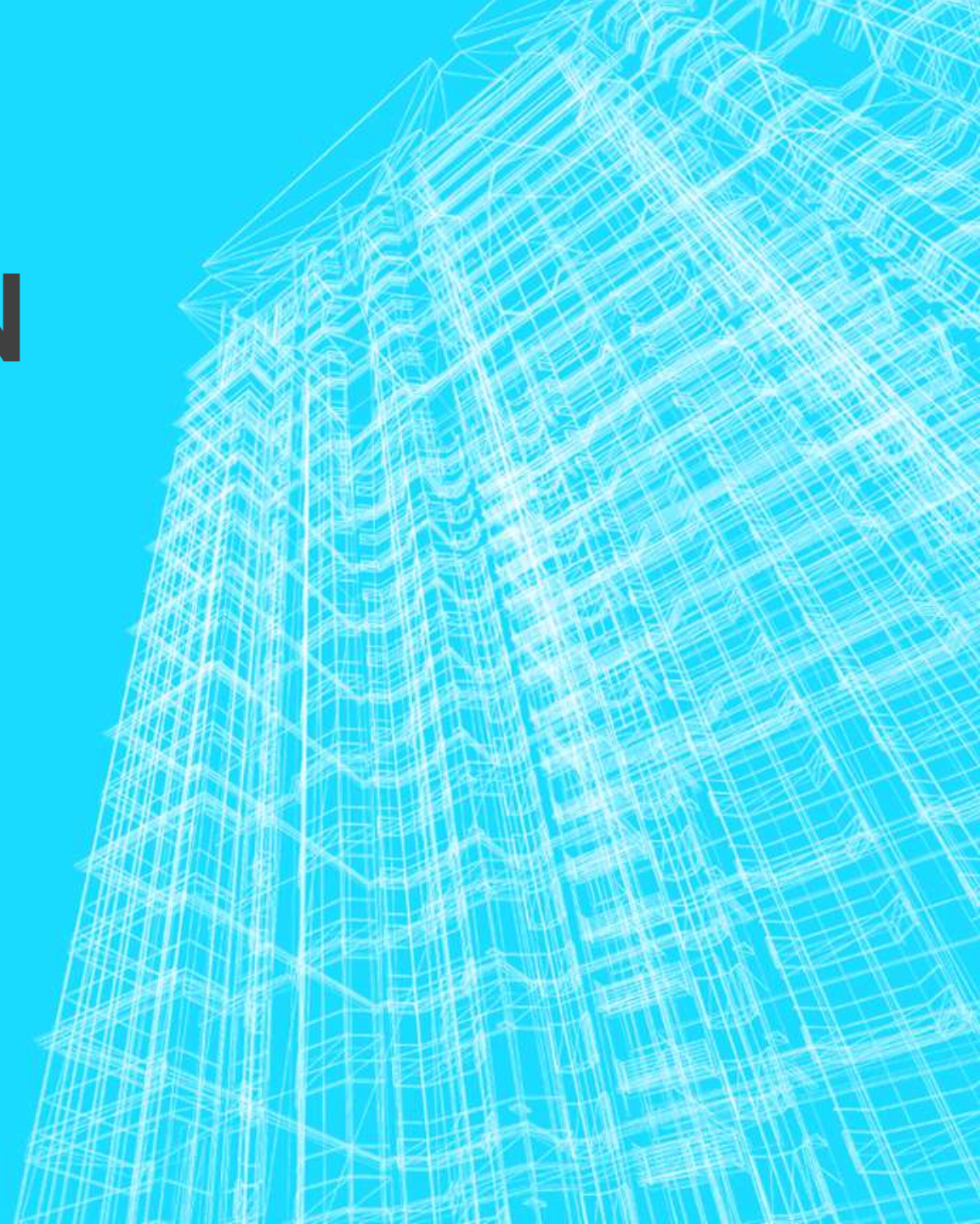


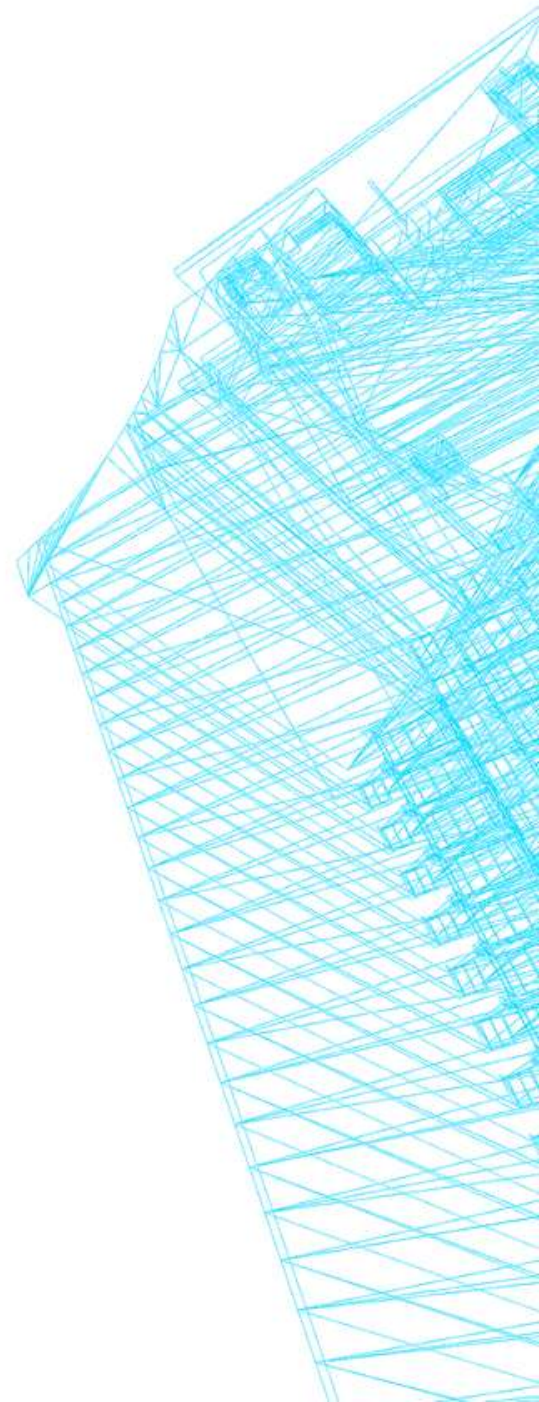
REVIEW RPJMD DAN KELEMBAGAAAN

Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2018



PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Metode



Latar Belakang

1. Tahun ini adalah paruh waktu pelaksanaan RPJMD atau separuh periode KDH terpilih;

Banyak capaian kinerja yang sudah terlampaui dan yang jauh belum tercapai;

Waktu itu (2016 akhir) OPD dibentuk sebelum RPJMD, dengan murni menerjemahkan kewenangan dalam UU 23/2014 dengan metode sesuai PP 18;

Dalam rangka Percepatan Pembangunan, direkomendasikan oleh MenPANRB utk melakukan reviu terhadap RPJMD dan Kelembagaannya;

Semangat reviu kelembagaannya diarahkan pd menghasilkan postur Kelembagaan yang "fit" terhadap postur Pembangunan (Perencanaan);

Jadi, dasar utama reviu kelembagaannya adalah hasil re-desain kembali RPJMDnya.

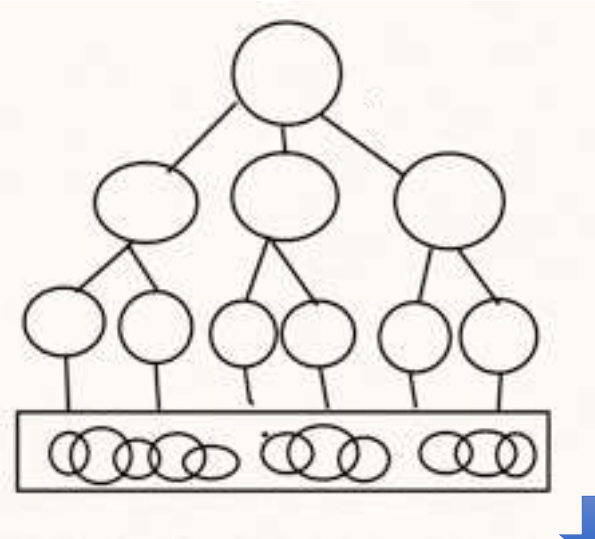
Reviu RPJMD

- Mandat Permendagri 86/2017, bahwa RPJMD dievaluasi paling tidak 1 kali dalam 5 tahun (periode);
- Tahun 2019 merupakan Paruh Waktu pelaksanaan RPJMD Kab Banyuwangi 2016-2023;
- Perlu mengetahui sejauh mana target-target kinerja dalam RPJMD yang telah tercapai dan belum tercapai;
- Perlu mengetahui sejauh mana kerangka kebijakan ekonomi dan keuangan daerah masih relevan dengan kondisi saat ini;
- Perlu mengetahui apakah logframe kinerja telah sesuai dan efektif dalam pencapaian visi-misi kepala daerah;
- Diperlukan langkah-langkah percepatan dan penyesuaian pencapaian kinerja pembangunan;

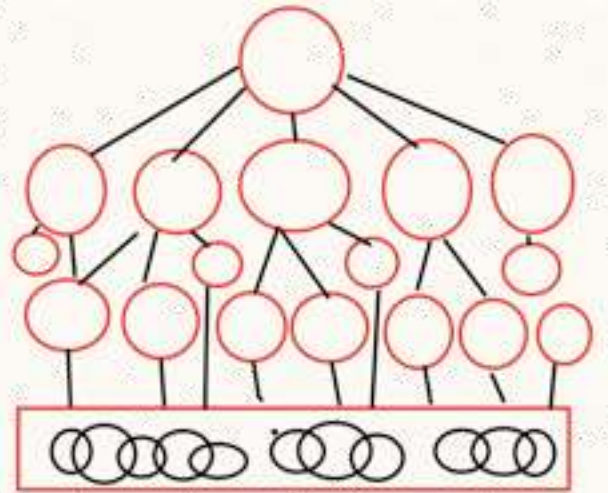
Reviu Kelembagaan

- Bahwa OPD adalah pelaksana rencana, kebijakan dan program dari Visi-Misi Kepala Daerah;
- Bahwa Tupoksi OPD merupakan representatif dari urusan yang di desentralisasikan UU 23/2014;
- Dalam sejarahnya penyusunan OPD melalui mekanisme PP 18/2016 belum mengakomodir kebutuhan RPJMD, karena OPD lahir mendahului RPJMD;
- Dalam perjalanannya dirasakan struktur organisasi dan tupoksi dari OPD tidak fit terhadap arsitektur perencanaan yang dibangun dalam RPJMD;
- Diperlukan sinkronisasi antara menjalankan mandat urusan dan kewenangan UU 23/2014 dan kebutuhan mengawal target kinerja pembangunan dalam RPJMD;
- Desain kelembagaan merupakan syarat mutlak efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan;

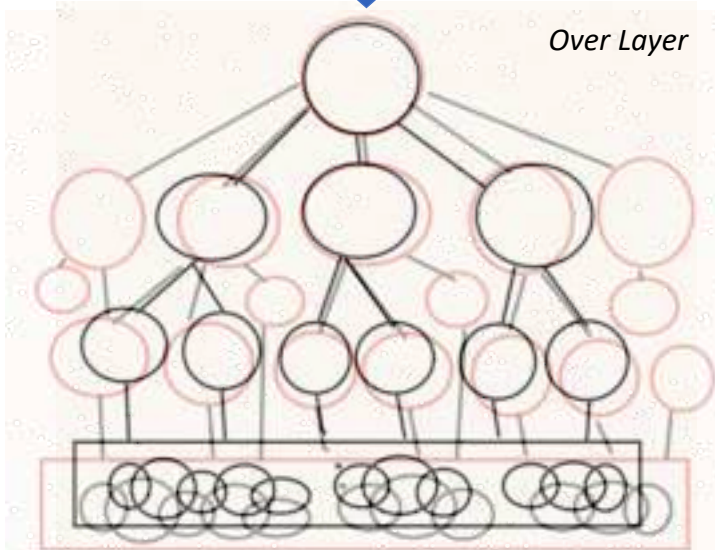
Postur Perencanaan
RPJMD



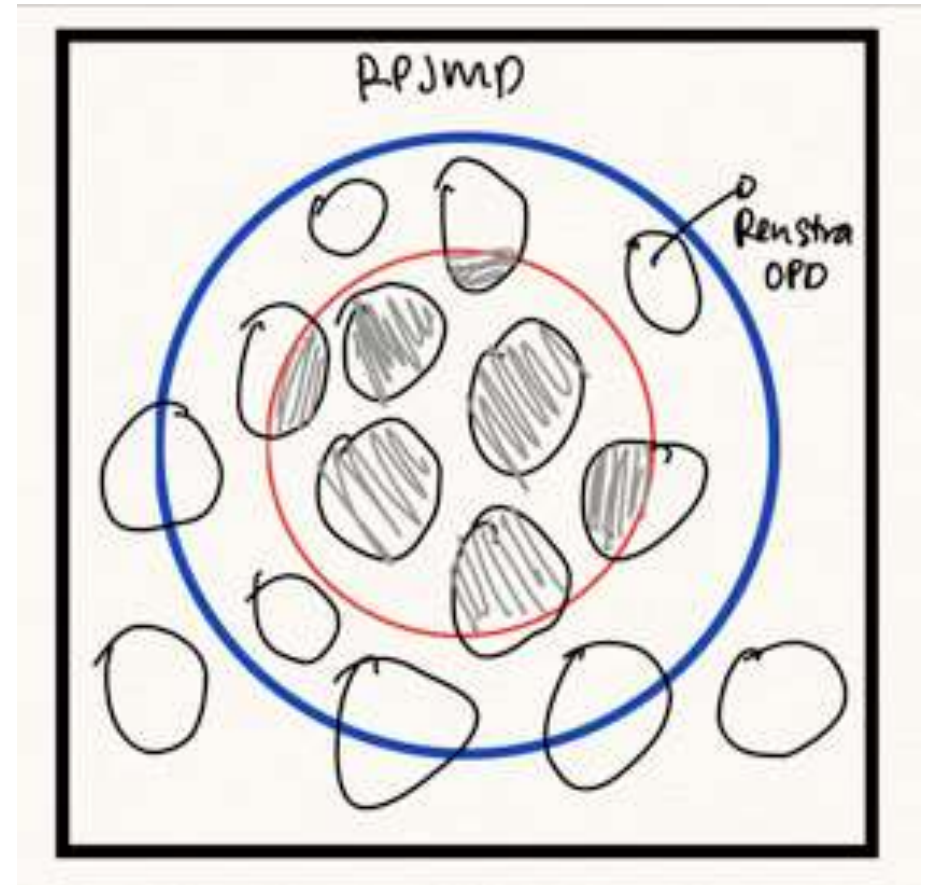
Postur Kelembagaan
Perda OPD



Over Layer

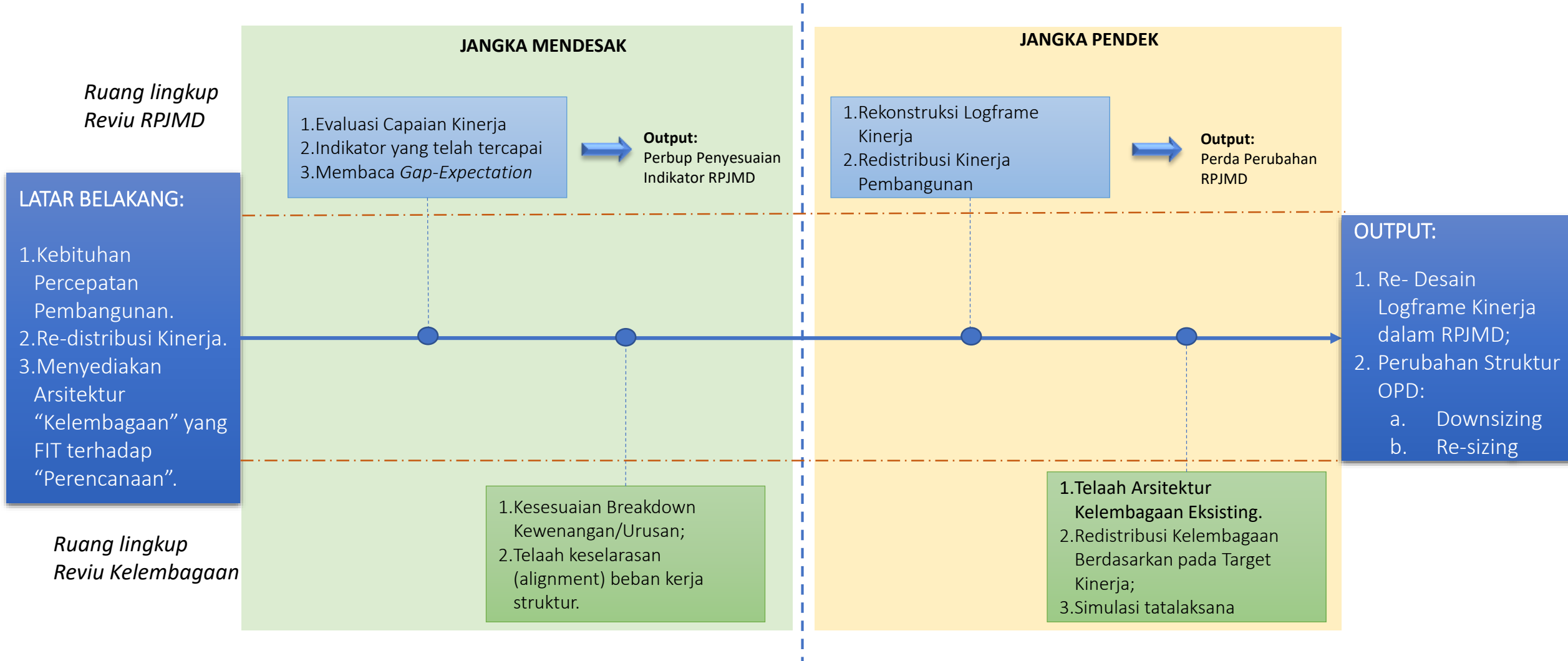


Bias Arsitektur Perencanaan dengan
Kelembagaan

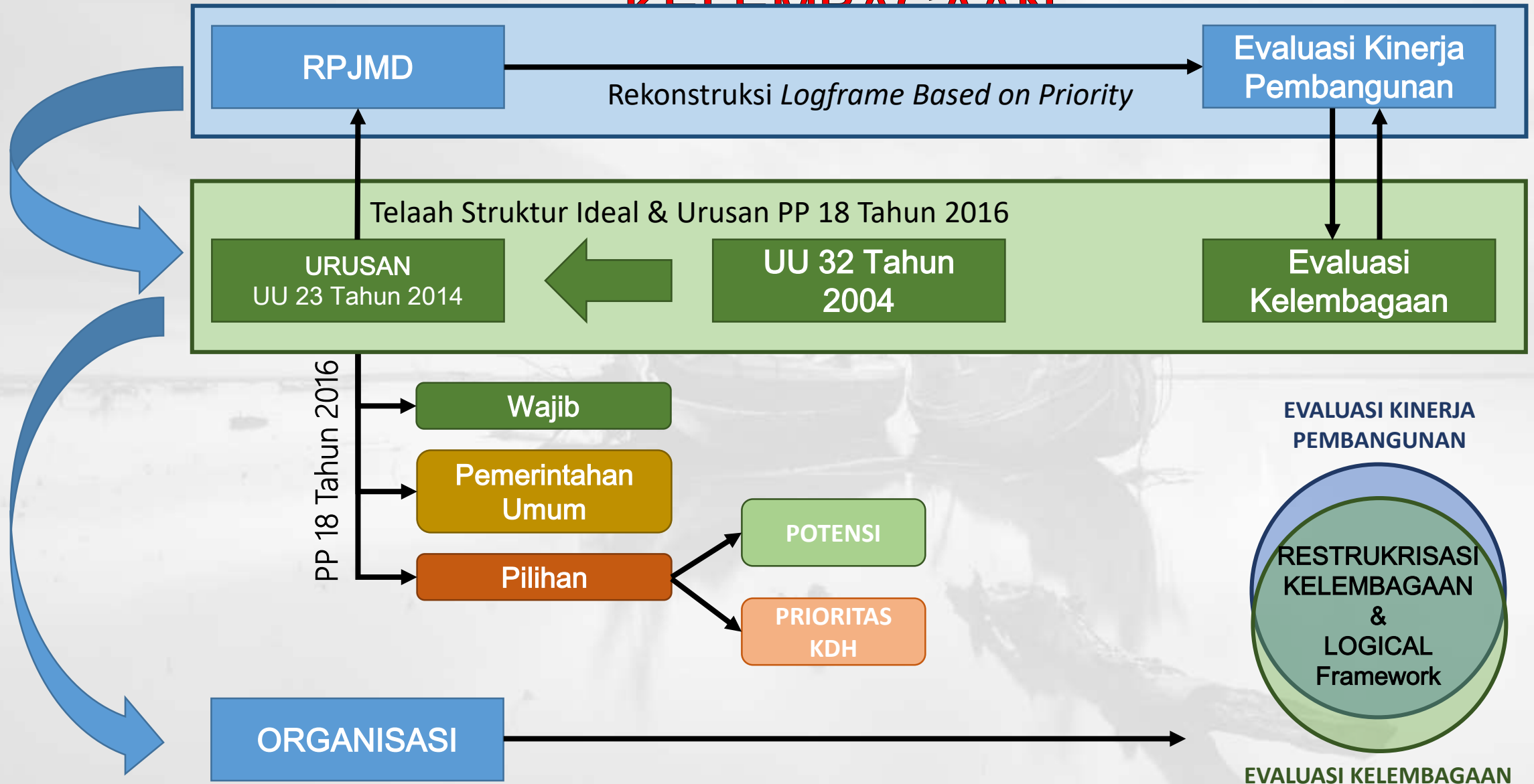


1. Terdapat OPD yang berisikan penuh dengan prioritas pembangunan daerah;
2. Terdapat OPD yang sebagian berisikan dan sebagian diluar prioritas pembangunan;
3. Terdapat OPD yang sama sekali diluar prioritas pembangunan daerah, OPD jenis ini berpotensi inefisiensi kinerja.

Bussines Process Reviu RPJMD dan Reviu Kelembagaan



KERANGKA KONSEP REVISI RPJMD & REVIEW KELEMBAGAAN

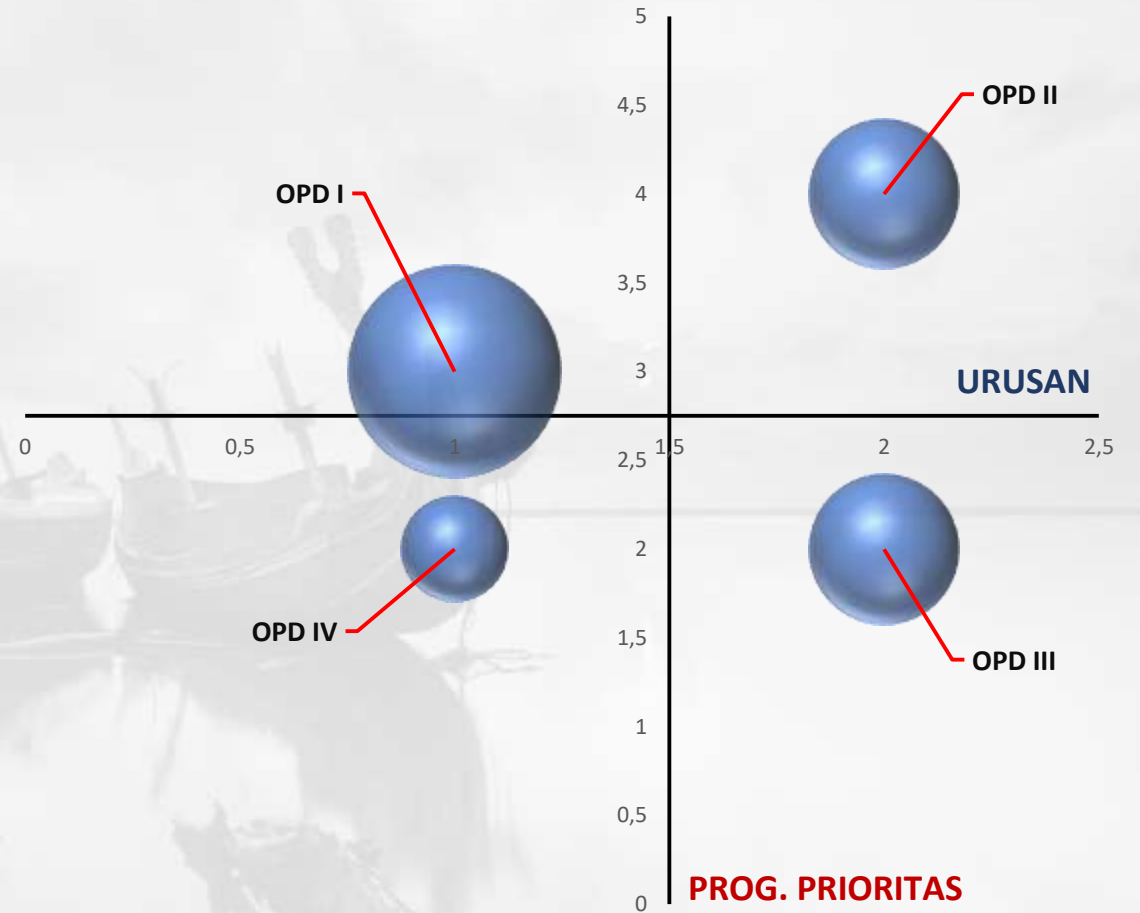


INSTRUMEN REVIEW KELEMBAGAAN DAN RPJMD

URUSAN	OPD 1				OPD 2			
	BID 1.1	BID 1.2	BID 1.3	BID 1.4	BID 2.1	BID 2.2	BID 2.3	BID 2.4
URUSAN 1	√	√	√	√				
URUSAN 2					√	√		
URUSAN 3							√	√

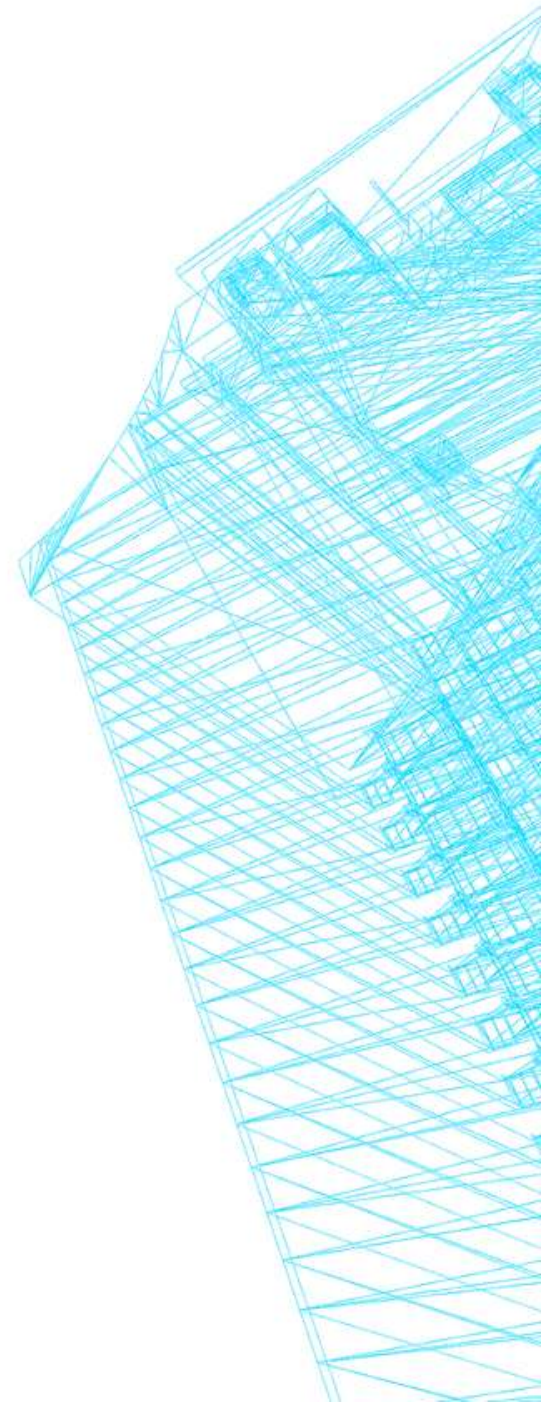
OPD	BIDANG	URUSAN	PROGRAM PRIORITAS
OPD I
OPD II
OPD III
OPD IV

PROGRAM PRIORITAS RPJMD	OPD 1				OPD 2			
	BID 1.1	BID 1.2	BID 1.3	BID 1.4	BID 2.1	BID 2.2	BID 2.3	BID 2.4
PROG. PRIORITAS 1	√							
PROG. PRIORITAS 2		√						
PROG. PRIORITAS 3		√						
PROG. PRIORITAS 4			√					
PROG. PRIORITAS 5					√			
PROG. PRIORITAS 6						√		
Dst...								√



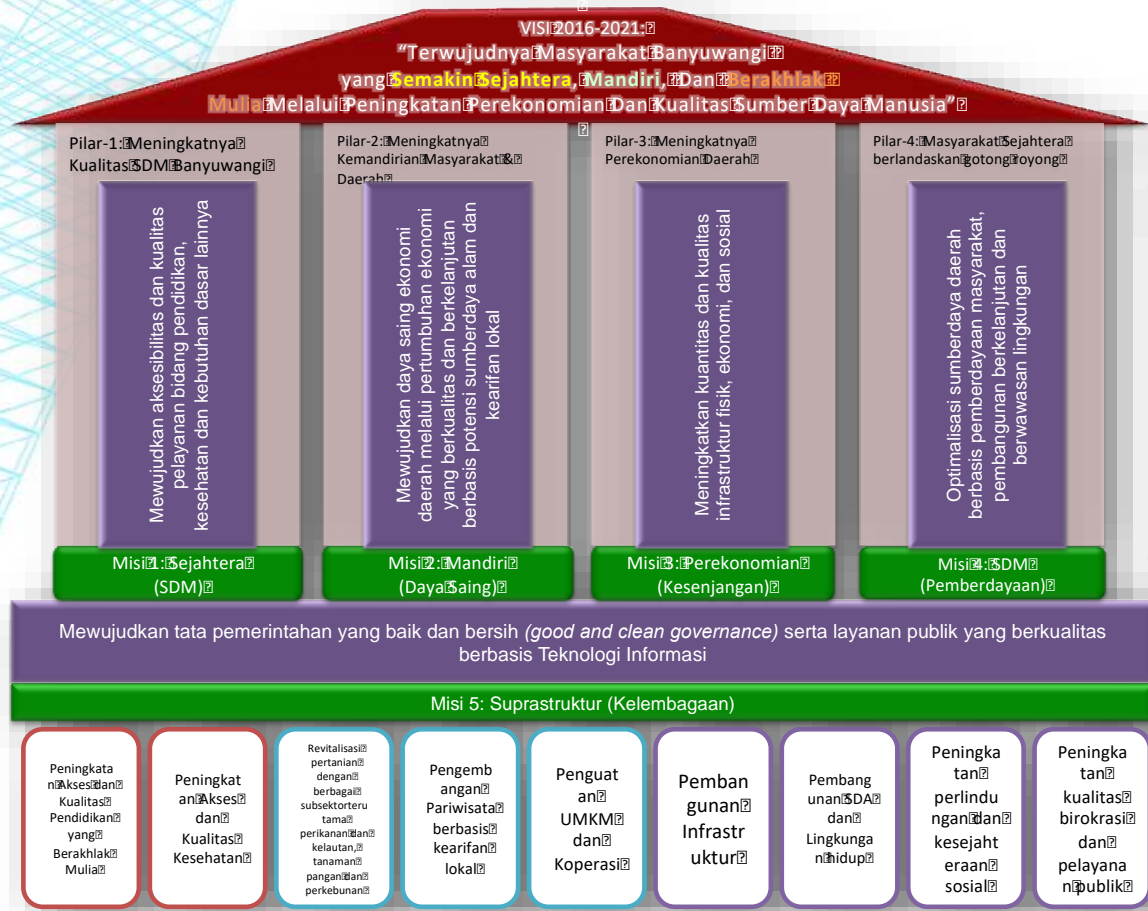
LOGFRAME BARU

Causal Loop Diagram, Cascading , Kondisi Before After Hasil Reviu

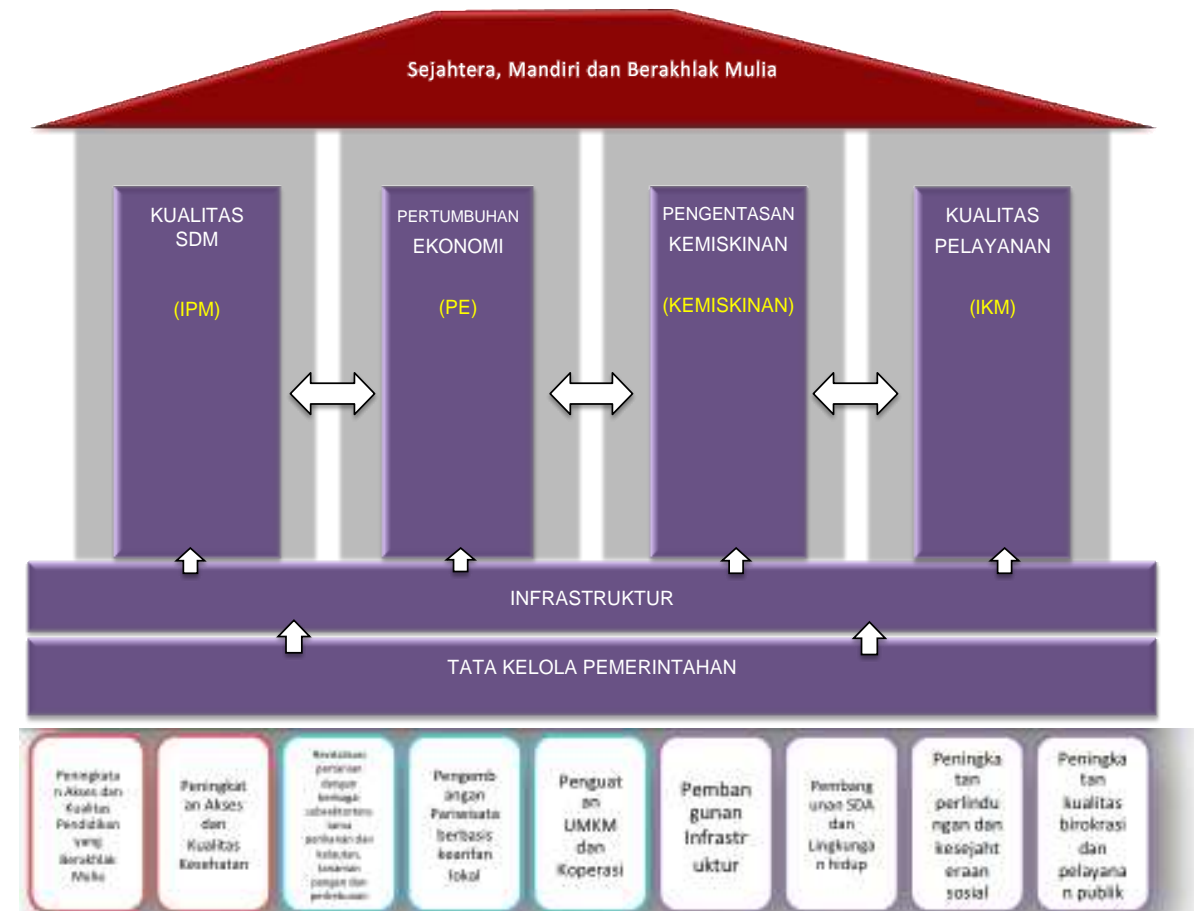


REKONSTRUKSI PENCAPAIAN VISI-MISI BARU

SEBELUM



SESUDAH



TUJUAN

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

LEVEL
1

INDIKATOR
TUJUAN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

SASARAN
STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS
DAN AKSES PENDIDIKAN

MENINGKATNYA KUALITAS
DAN AKSES KESEHATAN

MENINGKATNYA DAYA BELI
MASYARAKAT TERHADAP
KOMODITAS PANGAN DAN
NON PANGAN

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

INDEKS PENDIDIKAN

INDEKS KESEHATAN

INDEKS PURCHASING
POWER PARITY (PPP)

OPD
LEADING

DINAS
PENDIDIKAN

DINAS
PEMUDA DAN
OLAHRAGA

DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

DINAS
KESEHATAN

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
KELUARGA
BERENCANA

DINAS
PERIKANAN
DAN KETAHANA
PANGAN

DINAS
PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN



SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES PENDIDIKAN

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

INDEKS PENDIDIKAN

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SD

PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SMP

PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI DAN OLAHRAGA REKREASI

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

URUSAN

URUSAN PENDIDIKAN

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

URUSAN PERPUSTAKAAN

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSES KESEHATAN

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

INDEKS KESEHATAN

PROGRAM UNGGULAN

KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

SUMBERDAYA KESEHATAN

PELAYANAN KESEHATAN

KESEHATAN KELUARGA

PROGRAM KB

URUSAN

URUSAN KESEHATAN

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT TERHADAP KOMODITAS PANGAN DAN NON PANGAN

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

INDEKS PPP

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM STABILITAS HARGA KOMODITAS PERDAGANGAN

URUSAN

URUSAN KETAHANAN PANGAN

URUSAN PERDAGANGAN

TUJUAN

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN

LEVEL
1

INDIKATOR
TUJUAN

PERTUMBUHAN EKONOMI

SASARAN
STRATEGIS

MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN
YANG BERKELANJUTAN

BERTAMBAHNYA NILAI INVESTASI

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

PERTUMBUHAN PDRB
SEKTOR UNGGULAN

INDEKS KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

PERTUMBUHAN NILAI
INVESTASI

TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA (TPT)

OPD
LEADING

DINAS
PERTANIAN

DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN

DINAS
PARIWISATA

DINAS KOPERASI
DAN UMKM

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

DINAS
PUCKTR

DINAS
PERINDAG

DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN PTSP

DISNAKERTRANS

DINAS KOPERASI
DAN UMKM

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR UNGGULAN

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK DAN HASIL PETERNAKAN

PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN KUALITAS PRODUK TANAMAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN KUALITAS PRODUK PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI DAN JARINGAN KEMITRAAN PARIWISATA

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

URUSAN

URUSAN PERTANIAN

URUSAN PERIKANAN

URUSAN PARIWISATA

URUSAN KOPERASI & UMKM

URUSAN LINGKUNGAN

URUSAN PUPR

SASARAN STRATEGIS

MENAMBAH NILAI INVESTASI

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI

TINGKAT PENGANGGURAN

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGUATAN KEBIJAKAN DAN PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PENEMPATAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PENJUMBUHAN WIRUSAHA BARU

URUSAN

URUSAN PENANAMAN MODAL

URUSAN PERINDUSTRIAN

URUSAN TENAGA KERJA

URUSAN TRANSMIGRASI

URUSAN KOPERASI & UMKM

TUJUAN

MENGENTASKAN MASYARAKAT DARI KEMISKINAN

LEVEL
1

INDIKATOR
TUJUAN

ANGKA KEMISKINAN

SASARAN
STRATEGIS

MENGURANGI KESENJANGAN
TINGKAT PENDAPATAN

MENJAMIN
PERLINDUNGAN SOSIAL

MENINGKATNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

INDEKS GINI

PERSENTASE PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)

IPMas
(Indeks
Pembangunan
Masyarakat)

IPG
(Indeks
Pemberdayaan
Gender)

IDM
(Indeks
Desa
Membangun)

OPD
LEADING

DISPERINDAG

DINAS PUCKTR

DINAS SOSIAL

DINAS
PENDIDIKAN

DINAS
KESEHATAN

BAKES
BANGPOL

SATPOL PP

DPP KB

DPP KB

DPMD



SASARAN STRATEGIS

KESENJANGAN

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

INDEKS GINI

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PEMBINAAN
SOSIAL LINGKUP
INDUSTRI KECIL

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGELOLAAN PASAR

PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN

URUSAN

URUSAN PERINDUSTRIAN

URUSAN PERDAGANGAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

SASARAN STRATEGIS

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

**PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(MASYARAKAT RENTAN)**

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN AKSES KUALITAS PENDIDIKAN SD

PROGRAM PENINGKATAN AKSES KUALITAS PENDIDIKAN SMP

URUSAN

URUSAN SOSIAL

URUSAN KESEHATAN

URUSAN PENDIDIKAN

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT (IPMas)

INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IPG)

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBERDAYAAN

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUS TAMAAN GENDER DAN ANAK

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

PROGRAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

URUSAN

URUSAN KESBANGPOL

URUSAN TRAMTIB LINMAS

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TUJUAN

**MENINGKATNYA NILAI KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS LAYANAN PEMERINTAH DAERAH**

LEVEL
1

INDIKATOR
TUJUAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

SASARAN
STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DAERAH

TERCIPTANYA INOVASI LAYANAN PUBLIK

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

NILAI SAKIP

INDEKS RB

OPINI WTP BPK
TERHADAP LKPD

INDEKS INOVASI PEMERINTAH DAERAH

OPD
LEADING

BAPPEDA

SETDA

INSPEKTORAT

SETDA

BKD

BPKAD

DISKOMINFO

DISPENDUK
CAPIL

SETDA

SASARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PEMERINTAH

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

NILAI SAKIP

INDEKS RB

**OPINI WTP
BPK TERHADAP
LKPD**

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI

PROGRAM PENINGKATAN
AKUNTABILITAS KINERJA
APARATUR DAN INSTANSI
PEMERINTAH

PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL & PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
KDH

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN RB

PROGRAM PENILAIAN
DAN KAPASITAS KINERJA
APARATUR

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

URUSAN

URUSAN PERENCANAAN

URUSAN STAF DAN PENGAWASAN

URUSAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN DIKLAT

URUSAN
KEUANGAN



SASARAN STRATEGIS

TERCIPTANYA INOVASI LAYANAN PUBLIK

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

INDEKS INOVASI PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM TATA KELOLA
PENGEMBANGAN E-GOV

PROGRAM
PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN

PROGRAM
PELAYANAN PUBLIK

URUSAN

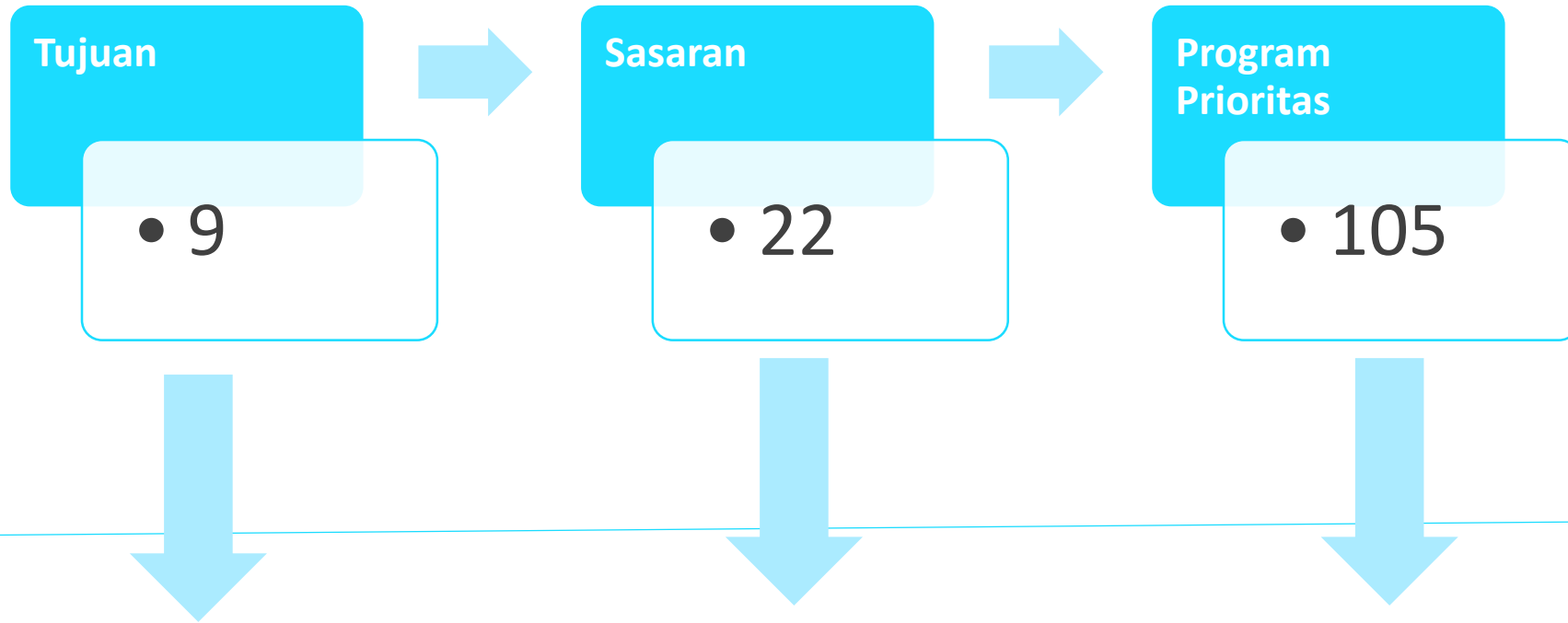
URUSAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

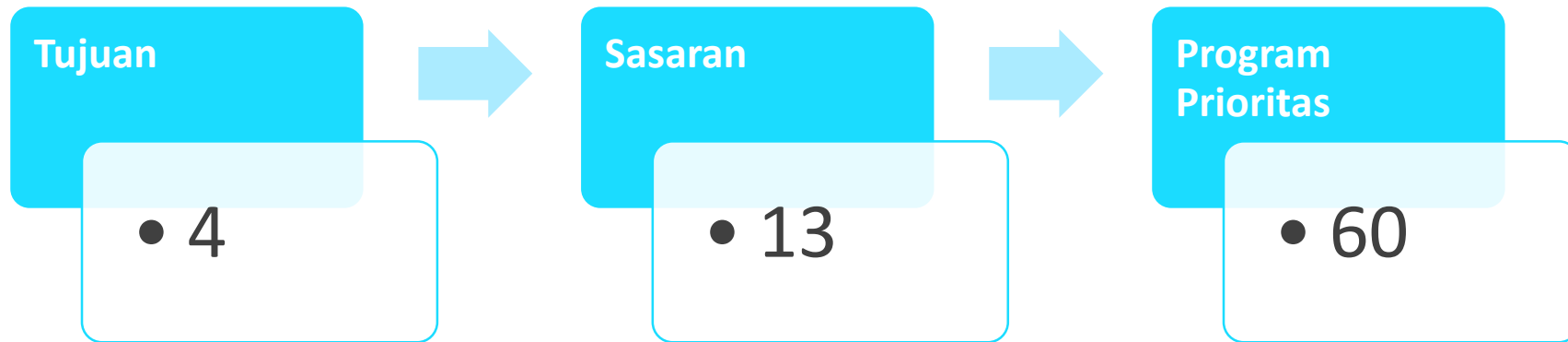
URUSAN
STAF DAN PENGAWASAN

Jumlah Tujuan, Sasaran, Program Sebelum dan Sesudah di Review

Sebelum Direview

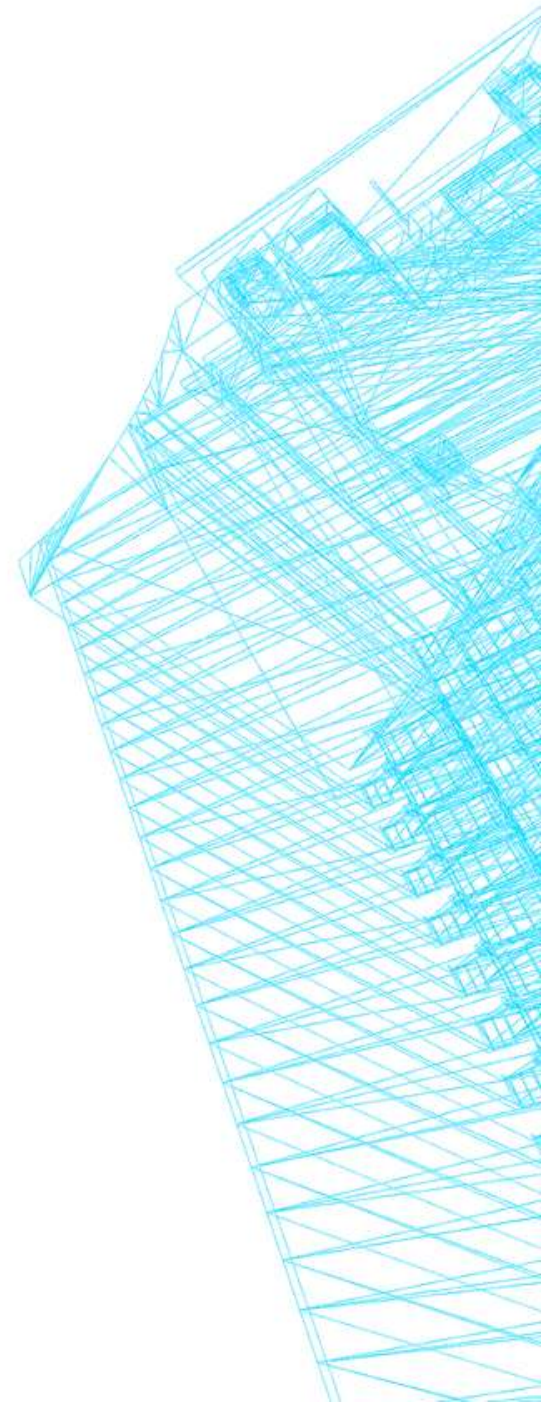


Setelah Direview

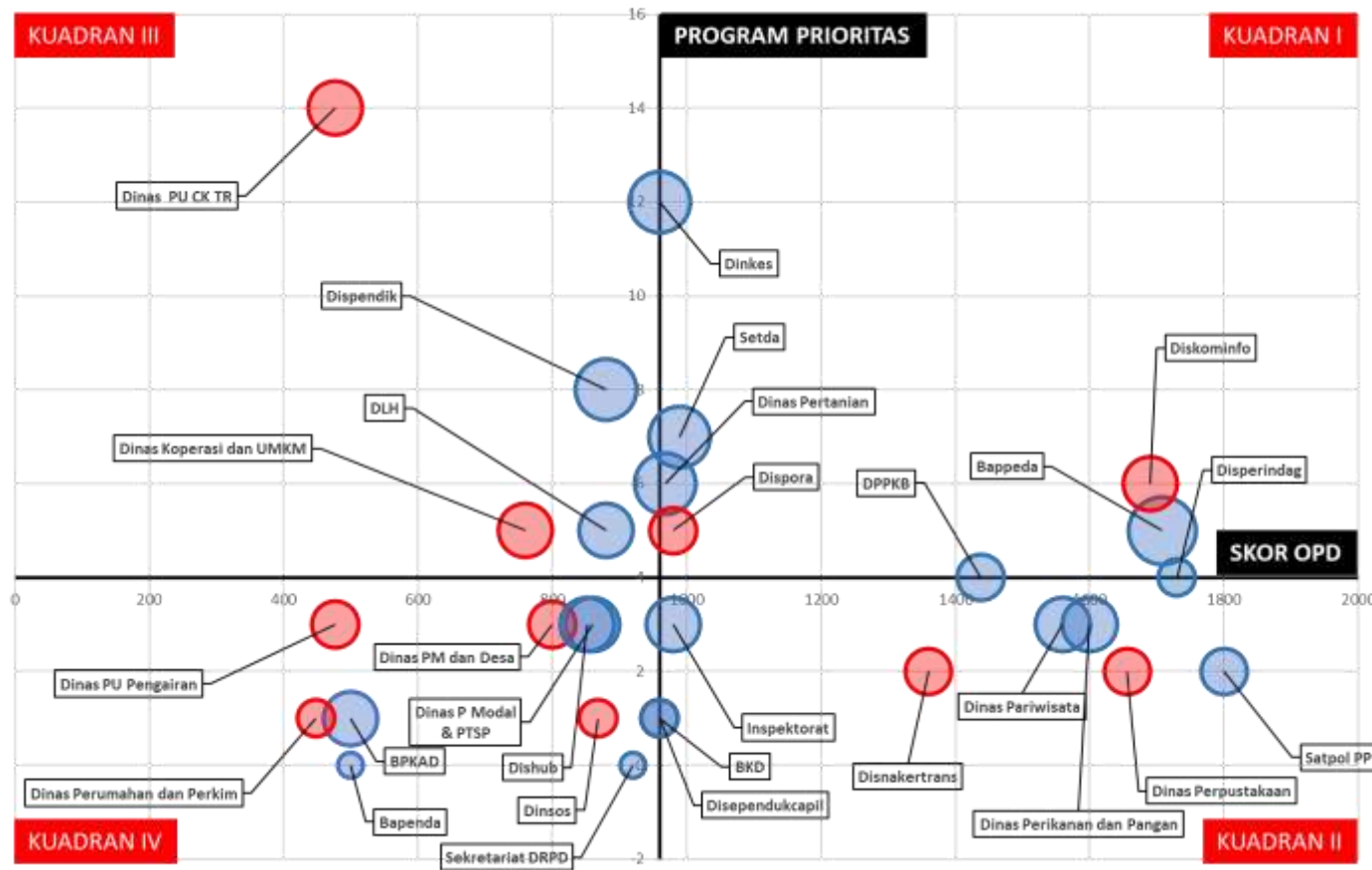


HASIL ANALISIS KELEMBAGAAN

Evaluasi Kesesuaian struktur kelembagaan dengan prioritas pembangunan



KUADRAN OPD PROGRAM PRIORITAS LAMA DAN KELEMBAGAAN LAMA



KUADRAN I

- Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD tinggi, dengan didukung program prioritas yang banyak

KUADRAN II

- Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD tinggi, namun tanpa didukung program prioritas yang banyak

KUADRAN III

- Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD rendah, namun menjadi prioritas kepala daerah yang direpresentasikan dengan jumlah program prioritas yang banyak

KUADRAN IV

- Merepresentasikan Perangkat Daerah dengan Skor OPD rendah, dan tidak menjadi prioritas kepala daerah

NB:

1. Warna pada lingkaran menunjukkan tipe organisasi **Merah** untuk perangkat daerah Type **B** dan **Biru** untuk Perangkat Daerah type **A**
2. Ukuran lingkaran menunjukkan jumlah kecilnya bidang yang terampu program prioritas kepala daerah
3. Skor perangkat daerah merupakan gabungan skor urusan dalam perangkat daerah
4. Skor urusan merupakan hasil review Kementerian Dalam Negeri melalui PP 18 Tahun 2016, sebagai pertimbangan Pem Kab. Banyuwangi dalam pembentukan OPD *existing*
5. Program prioritas merupakan program prioritas 1 yang merupakan penerjemahan terhadap *platform* politik kepala daerah kedalam RPJMD

THANK YOU

